



“Civil Society” sebagai Proyek Pencerahan

MUHAMMAD AS HIKAM

Peneliti LIPI Jakarta & Menristek RI

Bagaimana Anda melihat hubungan Islam dan pengembangan masyarakat sipil di Tanah Air?

Dalam melihat persoalan *civil society* saya selalu menggunakan dua tataran, yaitu tataran institusional-sosiologis, dan tataran ideal atau visi. Dari segi institusional, bagaimanapun harus diakui ada akar-akar *civil society* di Indonesia — sekalipun sangat sederhana. Seperti lembaga-lembaga *intermediary* antara negara dengan masyarakat, baik yang bersifat tradisional maupun modern, termasuk yang dimiliki oleh organisasi atau gerakan Islam sejak dahulu atau sekarang. Pada tataran itu, yang diupayakan adalah bagaimana mengembangkan lembaga tersebut agar semakin mencakup kemampuan-kemampuan yang semakin rasional, sehingga bisa melakukan kontak, komunikasi atau *networking* dengan kelompok-kelompok di luar gerakan-gerakan Islam. Adanya lembaga-lembaga seperti NU, Muhammadiyah dan lain-lain itu secara institusional-sosiologis merupakan akar-akar dari *civil society* secara kelembagaan itu.

Sementara dari segi visi, kita agak mengalami kesulitan, sebab hal itu menuntut adanya kemampuan untuk menyerap nilai-nilai dari luar yang mungkin untuk sementara masih dianggap di luar Islam,

seperti warisan-warisan *enlightenment* (pencerahan). Seperti rasionalitas, sekularisasi, dan juga nilai demokrasi yang sangat humanitarian. Ini pun sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh pemikir-pemikir Islam, terutama dalam konteks modern, seperti Abdurrahman Wahid. Upayanya mencari persamaan antara produk *enlightenment* dengan khazanah Islam itu berjalan, walaupun tidak semuanya ada kesepakatan. Yang dicari bukanlah perbedaannya. Sebab itu masalah pendekatan saja. Ada orang yang mencari persamaannya, dan ada pula yang mencari perbedaannya.

Menurut saya, lebih produktif kalau kita mencari persamaannya. Sebagai contoh, *enlightenment* di dalam *Universal Declaration of Human Rights* dengan *al-Ushul al-Khamsah*. Yang dicari bukanlah perbedaannya, sebab perbedaan itu jelas ada. Dan dengan adanya persamaan tersebut, kemudian ada sinergi antara khazanah Islam dengan khazanah luar.

Oleh karena itu, dalam tataran visi mengenai *civil society*, kita tidaklah kemudian mencari alternatif yang Islami, atau harus Islami. Cara-cara seperti ini justru tidak produktif. Upaya menggantikan visi *civil*

society dengan model masyarakat seperti pada zaman Nabi itu akan menghalangi kemungkinan kita melakukan pencangkakan produk-produk *enlightenment*. Peneakanannya adalah pada kemampuan kita melakukan pencangkakan-pencangkakan tanpa harus menghilangkan identitas masing-masing pihak. Dan ini dalam pandangan orang yang melihat sisi Islam saja tentu kurang memuaskan. Tetapi bagi saya, kita jadinya lebih bisa berbicara dengan orang lain, bahkan lebih luas lingkup dan cakupan pembicaraan mengenai *civil society*.

Belakangan Anda terlibat dalam satu perdebatan dengan para pendukung "masyarakat madani". Bagaimana persisnya perdebatan tersebut?

Mengenai perdebatan itu, bagi saya, Dawam [M. Dawam Rahardjo] dan Cak Nur [Nurcholish Madjid] masih dalam konteks yang menekankan visi partikularistik, yakni bahwa Islam itu merupakan alternatif visi. Bagi saya itu tidak harus alternatif, tetapi harus bisa bersama-sama dengan yang lain. Oleh karena itu bila Cak Nur mengatakan bahwa Islam itu harus menjadi landasan *value* bagi masyarakat Indonesia, seperti halnya Judeo-Christianity yang menjadi landasan *value* bagi masyarakat Barat, maka saya melihat Islam itu hanya sebagai salah satu bagian dari sekian banyak *value systems*. Saya lebih sepakat dengan Gus Dur, bahwa Islam di Indonesia lebih bersifat komplementer. Ini berbeda dengan Cak Nur yang melihat Islam itu sebagai *dominant ideology*. Kalau Dawam lebih parah lagi. Ia betul-betul berupaya meng-Islamisasi *civil society*.

Saya setuju kalau sebutan "masyarakat madani" itu hanya berupa pengalihbahasaan *civil society*. Akan tetapi, "masyarakat madani" itu bukan pengalihbahasaan semata, tetapi merupakan sebuah konsep yang khusus yang kemudian disebut sebagai "*civil society*". Di sinilah perbedaannya. Kalau sekedar pengalihbahasaan untuk diperkenalkan, maka saya akan menggunakan "masyarakat sipil", bukan "masyarakat madani".

Soal visi tadi, Anda menyebut sekularisasi. Kenapa dari dulu Anda tidak memperkenalkan civil society sebagai konsep sekular, sehingga tidak terjadi adanya penjinakan dari sisi agama seperti dalam kasus "masyarakat madani"?

Sekularisasi yang saya pikirkan itu bukanlah sekularisasi seperti yang dicurigai banyak orang itu. Menurut saya, sekularisasi adalah soal pembagian, yakni diferensiasi peran dan fungsi, dan bukan pengasingan agama, tapi lebih sebagai pembagian kerja. Agama pada akhirnya harus memberi ruang kepada hal-hal yang bersifat profan dalam masyarakat modern. Begitu pula masyarakat modern. Sehebat apapun bentuk masyarakat itu, mereka perlu merujuk pada nilai-nilai agama. Jadi sekularisasi di sini bukan berarti pengasingan, seperti pada masa *Aufklärung*-nya Auguste Comte dan lain-lain, yang menyatakan bahwa agama yang transendental itu harus pergi. Kalau kita melihat proses demokratisasi yang terjadi di mana-mana, peran gereja atau agama itu tetap ada. Tetapi tidak lantas setelah berperan dalam demokratisasi, lalu ingin berkuasa. Begitu proses demokratisasi selesai, ia mengundurkan diri. Nah, hal seperti itu yang saya

maksud.

Dalam konteks Islam di Indonesia, apakah Anda masih melihat peluang untuk itu?

Buktinya bisa. Seperti yang dilakukan oleh NU. Artinya, NU mencoba menciptakan gerakan Islam yang mampu menyerap *enlightenment*, walaupun secara sangat pelan. Dan memang spektrum di NU begitu luas, sehingga orang seperti Fachry Ali itu tidak akan bisa melihat hal seperti itu, dan cenderung selalu mengatakan bahwa warga NU tidak bisa menerima pemikiran Gus Dur. Tapi karena bukan orang NU, maka ia tidak bisa melihat elemen-elemen yang ada di NU itu banyak yang sudah menyerap pikiran-pikiran seperti itu. Diskursus mengenai wacana *gender equality* merupakan hal yang biasa. Tapi di sana pun juga ada unsur konservatif. Dan Fachry hanya melihat unsur yang konservatif yang dikatakannya menolak gagasan Gus Dur. Dan harap tahulah bahwa variasi-variasi atau spektrum dalam NU itu jauh lebih kaya dari pada kelompok modernis. Persoalannya tinggal memperluas dan memperkuat elemen-elemen *enlightenment* yang ada di NU. Dan ini adalah pekerjaan yang tidak mudah.

Menurut saya, gerakan Islam yang sudah tereformasi itu adalah NU, karena berhasil melakukan pencangkakan dan sintesa dari berbagai khazanah. Sedangkan kelompok modernis itu belum tereformasi, dan cenderung sangat *rigid*. Soal perempuan jadi presiden saja ruwet, dan mereka sangat puritan dalam menghadapi pengaruh-pengaruh *enlightenment*.

Problemnya, ketika mengambil NU sebagai

embrio itu berarti masih terkesan primordial?

Tentu saja. Tetapi di NU itu ada gerakan, yakni ada keinginan untuk melakukan pencangkakan-pencangkakan. Jangan menganggap NU itu sebagai barang yang statis. Bahwa mayoritas atau 30-40 persen itu masih primordial, memang betul, tetapi orang seperti saya, tidak bisa dikatakan primordial.

Kira-kira peta NU itu seperti apa, sehingga Anda begitu optimis bahwa NU adalah embrio civil society?

Karena melihat spektrum yang begitu luas itu, Anda jangan positivistik melihat NU dengan melihat nomornya saja. Misalnya jumlah warga NU itu 40 juta, kira-kira yang konservatif itu 35 juta, kemudian yang setengah konservatif itu ada 4 juta, dan yang agak *enlightened* itu 500 ribu orang, serta yang betul-betul *enlightened* itu sedikit. Jangan melihatnya seperti itu. NU itu cuma ada satu. Orang seperti Gus Dur itu memang satu, tapi orang yang menggunakan pikiran-pikiran Gus Dur itu, sedikit-tidaknyanya yang memilih PKB itu, tidaklah sedikit. Dan tidak bisa dipersoalkan bahwa yang memilih PKB itu cuma ikut-ikutan. Itu pikiran orang elite yang menganggap semua orang harus berpikir sama dengan dirinya sendiri. Setidak-tidaknya mereka, yakni pemilih PKB, *share* terhadap visinya Gus Dur.

Jadi wacana seperti PKB itu tidak akan merusak elemen-elemen enlightenment civil society?

Tadi bicara soal spektrum. Proses pencerahan, transformasi, reformasi dalam tubuh NU itu sudah dimuali sejak tahun

1980-an dengan munculnya tokoh-tokoh muda dan pemikir NU, seperti Masdar F. Mas'udi, dll. Ke depan, sejauhmana spektrum *enlightenment* ini bisa menerobos dan memperluas wilayahnya. Ini yang disebut *internal struggle* dalam visi NU. Ketika proses ini sedang berjalan, muncul kemudian perubahan politik di Indonesia, di mana semua orang *rame-rame* bikin partai, termasuk elemen dalam NU yang memang ada spektrum politiknya. Ini bisa merusak, kalau spektrum yang berorientasi *civil society* yang *enlightened* itu tidak bisa bertahan dari gempuran keinginan menjadi partai politik. Menurut saya, ada dua cara menghadapi fenomena ini. *Pertama*, partai itu harus diisi oleh orang-orang yang *enlightened*. *Kedua*, NU betul-betul melepas diri dari partai itu.

Menurut saya, lebih baik pilihan kedua ini yang diambil, artinya setelah muktamar pasca pemilu NU betul-betul netral, sehingga bisa meneruskan pekerjaan *khittah*. Sebab saya khawatir, kalau alternatif pertama yang diambil, maka bisa jadi masalah nanti. Di samping orang yang *enlightened* itu juga tidak banyak, kemampuan partai untuk merusak tatanan *civil society* itu masih sangat kuat dan tantangannya juga lebih besar. Jadi, saya melihat NU itu bukan dalam kerangka *zero sum game*. Berbeda dengan kelompok modernis, NU ini spektrumnya sangat besar. Bahkan yang agnostik pun ada di NU.

Bagaimana dengan lembaga-lembaga di NU seperti LP Ma'arif, Lakpesdam, dll?

Sebenarnya lembaga-lembaga ini bisa dikembangkan oleh NU dalam rangka mempertajam wacana *civil society* dan

membuatnya lebih optimis. Persoalannya, bagaimana orang NU itu bisa mengembangkan manajemen modern. Yakni mengisi LP Ma'arif, Lakpesdam, LKiS, Fatayat dll itu dengan orang-orang yang lebih *enlightened*. Oleh karenanya Muktamar NU di Kediri nanti menjadi sangat penting dalam kerangka itu. Kalau ternyata habis muktamar, NU diisi orang-orang *sontoloyo*, dan mereka memegang lembaga-lembaga *civil society* di NU, silahkan saja....

Tetapi saya tetap menyatakan bahwa kita harus optimis, karena selain NU, gerakan Islam di Indonesia yang betul-betul bisa menjadi *civil society* itu tampaknya susah. Mungkin secara institusional bisa, punya rumah sakit besar, universitas yang banyak, tapi yang bikin repot, visinya itu fundamentalis. Dan dalam membicarakan *civil society*, kita tidak bisa melepaskan diri dari dua elemen, yaitu elemen visi dan elemen institusi.

Bagaimana pandangan Anda mengenai ketergantungan lembaga-lembaga NU itu dengan funding asing?

Ya, salah satu tugasnya adalah menganggap bahwa *funding* itu hanya sebagai sesuatu yang bersifat sementara, dan ini akan kembali pada persoalan manajemen itu tadi. PWNU Jawa Timur itu misalnya tidak ada punya *funding* dari luar negeri. Mula-mula memang dibantu pemerintah daerah, tapi pada akhirnya bisa mandiri, dan uangnya bisa diinvestasikan dengan baik. Begitu pula sebaiknya lembaga-lembaga lain di lingkungan NU. Kalau dapat *funding*, kemudian tidak ada *atsar-nya* (dampaknya) itu bisa mengkhianati salah

satu ciri khas NU, yaitu kemampuan untuk mandiri. Hidupnya cuma ketika ada penyandang dana. Hal ini bukan tidak perlu, tetapi pada saat yang sama persentasinya itu harus semakin tidak mengganggu. Katakanlah *fifty-fifty*, kalau tidak ya *sixty-fourty*. Kalau bisa mandiri 40 % itu sudah mandiri. ❖